



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Strategis atau yang biasa disingkat Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat disusun. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini sebagai salah satu dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2025-2029). Rencana Strategis dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi dengan melakukan intervensi pada bidang-bidang strategis pada arah kebijakan lima tahun yang akan datang, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat terukur, dievaluasi dan ditingkatkan.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Strategi sangat kami harapkan guna perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 19 September 2025

**Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran**



DEWI NOVITA, S.STP, M.Si

NIP. 19791214 200003 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
 BAB I	 PENDAHULUAN	 1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
 BAB II	 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 8
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	27
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	27
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2	Isu Strategis	30
 BAB III	 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 33
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	33
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029	33
3.3	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	33
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
 BAB IV	 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 39
 BAB V	 PENUTUP	 69



KERTAS KERJA META DATA
KERTAS KERJA MANAJEMEN RESIKO
KERTAS KERJA POHON KINERJA
KERTAS KERJA INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Gender	15
2.2	ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan	15
2.3	ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan Terakhir	15
2.4	Kebutuhan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17
2.5	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	18
2.6	Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	20
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	23
2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh	26
2.9	Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	34
3.2	Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	35
3.3	Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	37
3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	38
4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40
4.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	50
4.3	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	63
4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	65
4.5	Indikator Kinerja Kunci	67
4.6	Indikator Kinerja Lainnya	68



DAFTAR GAMBAR

Tabel		Hal
2.1	Struktur Organisasi	9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra dimaksud.

Rencana strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra periode 2025-2029 sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di era globalisasi.

Perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal Kota Payakumbuh harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Payakumbuh. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

Program yang ada dalam Renstra ini merupakan program prioritas sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini akan menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengakomodir seluruh kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam upaya pencapaian target untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);



33. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
34. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);

Selain dari peraturan-peraturan diatas dalam penyusunan dokumen Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2025-2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan tuntunan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam menjamin kesinambungan perencanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Kota Payakumbuh.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam memberi arah pelaksanaan pembangunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tiap tahun salam kurun waktu tahun 2025 -2029;
3. Menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai urusan yang menjadi kewenangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;
4. Memudahkan dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan



pembangunan daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

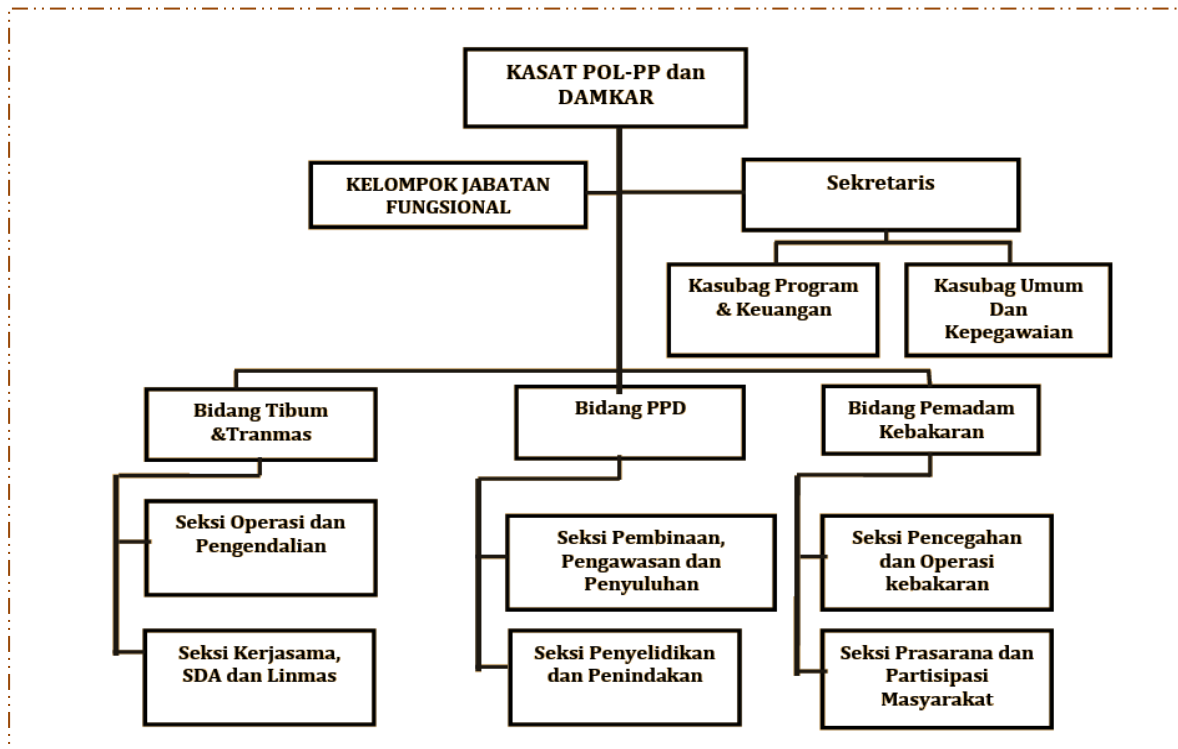
Sampai saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.

Struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala satuan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran. Kepala satuan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Satuan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Sub bagian ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Satuan. Sub bagian ini menyelenggarakan fungsi:



- a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaanm pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Satuan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Satuan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Satuan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Operasi dan Pengendalian

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Operasi dan Pengendalian. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama, Sumber Daya Aparatur (SDA), dan Linmas

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kerjasama, SDA, dan Linmas. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;



- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadam Kebakaran. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Operasi Kebakaran. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;



- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana dan partisipasi masyarakat. Seksi ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kondisi 04 September 2025 didukung oleh 40 orang Pegawai Negeri Sipil, CPNS 1 orang, 29 orang PPPK (4 orang di sekretariat, 15 orang di bidang tibum tranmas, 10 orang di bidang damkar), 118 orang Tenaga Non ASN (Banpol PP 97 Orang, Pemadam Kebakaran 21 Orang), 2 orang Tenaga Kebersihan, dan 4 orang tenaga sopir.

Adapun komposisi sumber daya manusia kondisi 04 September 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel II.1
ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Gender

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Satuan	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	3	-	3
4	Kepala Seksi	5	1	6
5	Kasubag	1	1	2
6	JFT (PPPK)	24	5	29
7	Pelaksana	26	3	29
8	Banpol PP	83	14	97
9	Pemadam Kebakaran	21	-	21
10	Sopir	4	-	4
11	Tenaga Kebersihan	-	2	2
Jumlah		167	27	194

Tabel II.2
ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol II	GOL V	Gol VII	Gol III	Gol IX	Gol IV	Jumlah
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	1	-	2	3
4	Kepala Seksi	-	-	-	6	-	-	6
5	Kasubag	-	-	-	2	-	-	2
6	JFT (PPPK)	-	27	1	-	1	-	29
7	Pelaksana	19	-	-	10	-	-	29
Jumlah		19	27	1	19	1	3	70

Tabel II.3
ASN dan Non ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Uraian	ASN		TJP		Outsourcing		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	S-2	3	1	-	-	-	-	4
2	S-1	6	4	15	8	-	-	33
3	D-IV	-	-	2	-	-	-	2
4	D-III	1	4	3	-	-	-	8
5	SMA	47	2	84	6	4	2	145
6	SMP	2	-	-	-	-	-	2
7	SD	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		59	11	104	14	4	2	194

Sesuai dengan Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam



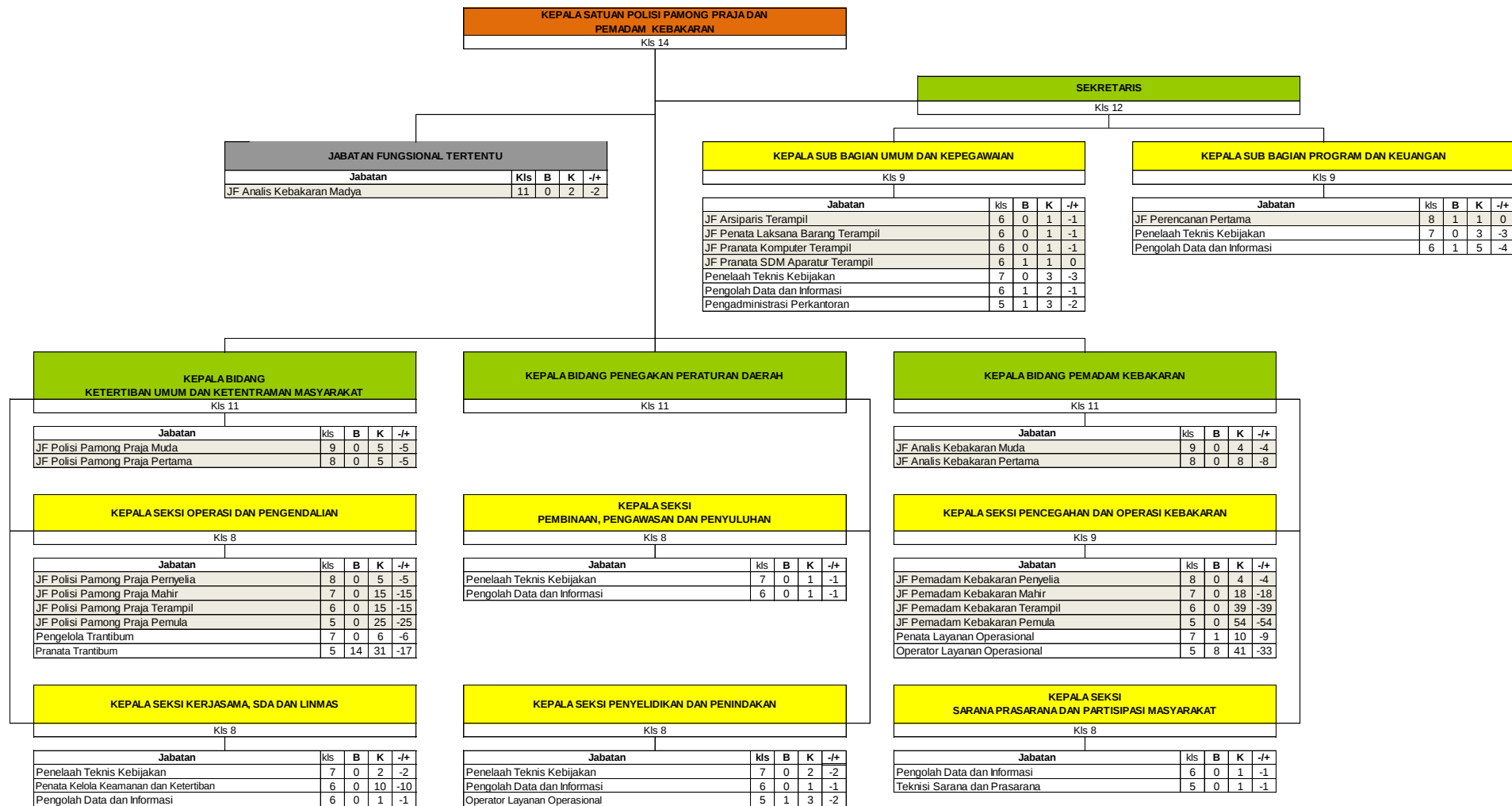
Kebakaran, Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dari bagan berikut :



Tabel II.4

Kebutuhan ASN Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PAYAKUMBUH





Dalam bagan diatas tampak kebutuhan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan jabatan fungsional. Kondisi saat ini, SDM Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS (Struktural), PPPK (Fungsional) dan Non ASN.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, penggolongan jenis standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran. Adapun jenis jabatan aparatur pemadam kebakaran yang dimaksud adalah:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pemadam 1 | 10. Investigator Madya Kebakaran |
| 2. Pemadam 2 | 11. Instruktur Muda Kebakaran |
| 3. Pemadam 3 | 12. Instruktur Madya Kebakaran |
| 4. Inspektur muda kebakaran | 13. Operator Mobil Kebakaran |
| 5. Inspektur madya kebakaran | 14. Montir Mobil Kebakaran |
| 6. Inspektur utama kebakaran | 15. Caraka Mobil Kebakaran |
| 7. Penyuluh muda kebakaran | 16. Operator Komunikasi |
| 8. Penyuluh Madya Kebakaran | Kebakaran |
| 9. Investigator Muda Kebakaran | |

Per 01 Januari 2025, ASN yang telah memiliki sertifikat PPNS sebanyak 3 orang, pemadam 1 (satu) sebanyak 37 orang dan inspektur muda kebakaran 1 orang.

Dalam menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh perlu dilengkapi dan difasilitasi sejumlah sarana dan prasarana yang baik dan memadai sesuai standar operasional. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Jumlah Saat Ini	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	AC Split	4	4		
2	Alat Khusus Kepolisian : Letter T, Helm Dalmas	35	35		
3	Alat Khusus Kepolisian : Rompi Anti Peluru	4	4		
4	Alat Khusus Kepolisian : Tameng	35	35		
5	Camera Electronic	1		1	
6	CCTV	1	1		
7	Dispenser	2			2
8	Facsimile	1		1	



No	Uraian	Jumlah Saat Ini	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
9	Filling Cabinet	15	4	5	6
10	Handy Cam	1		1	
11	Handy Talky	13		11	2
12	Kursi Kerja Ess III	1		1	
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8			8
14	Kursi Rapat	9			9
15	Kursi Tamu	3	2		1
16	Lap Top	7	7		
17	LCD Projector	1		1	
18	Lemari Kayu	8	1	7	
19	Meja Kerja Ess III	3	2	1	1
20	Meja Kerja Ess IV	3			3
21	Meja Kerja Ess IV	4			4
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13	4	8	1
23	Meja Komputer	3		3	
24	Mesin Absen	1			1
25	Mesin Ketik Manual Portable	1			1
26	Minibus BA 77 M	1	1		
27	Mobil Unit Tahanan	1	1		
28	Papan Pengumuman	2		2	
29	PC Unit	13	6	3	4
30	Pick Up	3	3		
31	Pistol	3		3	
32	Printer	20	13	1	6
33	Sepeda Motor	7	6		1
34	Sound System	1	1		
35	Televisi	3	1	1	1
36	Tempat Tidur Besi	24		12	12
37	Tustel	1			1
38	Unit Power Supply	1			1
39	Unit Tranceiver HF Portable	3		3	
40	Sumber Daya Manusia	3			
		16 Orang			
41	Lampu Lalin	0			
42	Borgol	0			
43	Tangga Lipat	0			
44	Ban Lengan	0			
45	Tempat Tidur Tingkat	0			
46	Ruangan Tahanan	0			



Tabel II.6

Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

No	Uraian	Jumlah Saat Ini	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Alat Pemadam Portable : Flexible 4 inch	2			2
2	Alat Pemadam Portable : Jet Nozel	6			6
3	Alat Pemadam Portable : LTF 9768	1			1
4	Alat Pemadam Portable : OSW SYNTEX UNIDUR	16			16
5	Alat Pemadam Portable : Protex	1	1		
6	Alat Pemadam Portable : Protex Style #368 (Pistol Grip)	2			2
7	Alat Pembantu Kebakaran : Alat Isi Ulang Tabung Baocer	1			1
8	Alat Pembantu Kebakaran : Anben Fire Sarung Tangan	10	10		
9	Alat Pembantu Kebakaran : Apar	1	1		
10	Alat Pembantu Kebakaran : Apar Pemadam Kebakaran	4	4		
11	Alat Pembantu Kebakaran : Apar Powder (Tensa 60gr)	1			1
12	Alat Pembantu Kebakaran : ayaxx 4strozcopling	4			4
13	Alat Pembantu Kebakaran : Baju Tahan Api	1	1		
14	Alat Pembantu Kebakaran : Branpipe 1,5	2	1		1
15	Alat Pembantu Kebakaran : Branpipe 2,5	1			1
16	Alat Pembantu Kebakaran : Couplinh Machino OFI	8	8		
17	Alat Pembantu Kebakaran : Derek Winch (EWG-6000)	1			1
18	Alat Pembantu Kebakaran : Fireproteck	1			1
19	Alat Pembantu Kebakaran : Floating Pump	1	1		
20	Alat Pembantu Kebakaran : Gunting Terali CRV	1	1		
21	Alat Pembantu Kebakaran : Helm Tahan Api Bullard LTX	2	2		
22	Alat Pembantu Kebakaran : Indolok 2,5	3			3
23	Alat Pembantu Kebakaran : Jet Nozzle Branpipe 2,5	1			1
24	Alat Pembantu Kebakaran : Jet Spray Nozel 366 A	1			1
25	Alat Pembantu Kebakaran : Kapak Pemadam Kebakaran	2	2		
26	Alat Pembantu Kebakaran : Konek Cabang Y PROTEK	1	1		
27	Alat Pembantu Kebakaran : Lampu Sorot Kepala Damkar	13	13		
28	Alat Pembantu Kebakaran : Mesin Pemotong Beton	1	1		
29	Alat Pembantu Kebakaran : Mesin Perahu 18 PK	1	1		
30	Alat Pembantu Kebakaran : Nozel Machino	4			4
31	Alat Pembantu Kebakaran : Nozel Machino (Indolok 1,5)	1			1
32	Alat Pembantu Kebakaran : OSW Fire House	3	3		
33	Alat Pembantu Kebakaran : Peralatan Oksigen Pemadam	1	1		
34	Alat Pembantu Kebakaran : Pistol Grip Nozzle	1	1		
35	Alat Pembantu Kebakaran : Protek Gun Nozzle	1	1		
36	Alat Pembantu Kebakaran : Rotary	2	1		1
37	Alat Pembantu Kebakaran : SCBA	1	1		
38	Alat Pembantu Kebakaran : Selang Hisap 5 inch	1	1		
39	Alat Pembantu Kebakaran : Selang Penghisap 6 inch	1	1		
40	Alat Pembantu Kebakaran : Sepatu Tahan Api	9	8		1



No	Uraian	Jumlah Saat Ini	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
41	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Kebakaran 1,5	2			2
42	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Pemadam 1,5 inch	2	2		
43	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Pemadam 2,5 inch	2	2		
44	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Pemancar (ayaxx 1,5x20m)	2			2
45	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Pembuangan 1,5 inch	1	1		
46	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Pembuangan 2,5 inch	2	2		
47	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Penghisap (Indolok 4)	1			1
48	Alat Pembantu Kebakaran : Slang Penghisap 4x4	2			2
49	Alat Pembantu Kebakaran : Spasciani	10	9		1
50	Alat Pembantu Kebakaran : Tabung Oksigen (FYR-Ridte)	1			1
51	Alat Pembantu Kebakaran : Tabung Oksigen Amscud	3	3		
52	Alat Pembantu Kebakaran : Wing Arm 4x4	1			1
53	Alat Pembantu Kebakaran : ZFMH-JX D RD	1	1		
54	Alat Pembantu Kebakaran : ZFMH-JX D RD CE en 469	1	1		
55	Asus Vivo Book	1	1		
56	Baju Anti Panas	6	4		2
57	Filling Cabinet	2	2		
58	Handy Talky (HT)	39			39
59	Helmet	8	8		
60	Hidran Kebakaran	6	6		
61	Kompor Gas	1	1		
62	Lemari Besi	1	1		
63	Lemari Buku Arsip	2	2		
64	Locker	1		1	
65	Meja 1/2 Biro	2	2		
66	Meja Kerja Pejabat Ess III	1	1		
67	Kursi Kerja Pejabat Ess III	1	1		
68	Meja Kerja Pejabat Ess IV	1	1		
69	Meja Komputer	1	1		
70	Minibus : Mitsubishi Colt T dan Toyota	2	1		1
71	Mobil Pemadam Kebakaran	4	3		1
72	Note Book Toshiba	1	1		
73	Pakaian Panas : IIIA Nomex	12			12
74	Pakaian Panas : Ruibber Boot Safety	12			12
75	Perahu Karet	1			1
76	Pick Up : Toyota Portable	1		1	
77	Sepeda Motor	3	2		1
78	Tustel	1			1
79	Unit Tranceiver HF Stationery	1		1	
80	Peti Perkakas Damkar	1	1		
81	Pompa Ebana Damkar	1	1		
82	ACCU / Aki	1			1
83	Motor Penggerak	1	1		



No	Uraian	Jumlah Saat Ini	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
84	Pompa Sedot	1	1		
85	Stop Kran 2,5 Fuso	1	1		
86	Kendaraan Pemadaman Kebakaran untuk Posko di Kecamatan				
87	Kendaraan Pemadaman Kebakaran untuk Sektor				
88	Kendaraan Rescue				
89	Kendaraan Supply Air				
90	Gedung Sektor	0			
91	Gedung Posko Kecamatan	0			
92	Tempat Tidur Tingkat	0			
93	Peralatan Vertical Rescue	0			
	a. Tali Panjat	0			
	b. Body Harness	0			
	c. sit harness	0			
	d. Pulley	0			
	e. Pelampung	0			
	f. Alat Anti tersedak	0			
	g. Self Rescue kit (Peralatan Penyelamatan Diri)	0			
	h. Helm Rescue	0			
94	SCBA	0			
95	Masker Respirator	0			
96	Chinsaw	0			
97	HT	0			
98	Lemari APD	0			
99	Baju Tawon	0			
100	Rescue tripod	0			
101	Peralatan Rescue	0			
102	Alat Pemotong Hidrolik	0			
103	Mesin cuci	0			
104	CCTV	0			

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Secara anggaran, realisasi pendanaan pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2021	2020	2021	2022	2023	2021	2020	2021	2022	2023	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 7.884.061.067	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.153.822.152	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,91	2,77	2,89	2,85	2,86	2.220.426.368	2.070.720.676
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 799.652.893	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 772.003.942	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	159.930.579	154.400.788
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.540.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.565.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000	513.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 17.700.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.369.468	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000	2.673.894
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 13.650.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.866.700	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000	973.340
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 163.637.250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.155.840	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727.450	31.831.168
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 34.617.005	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34.407.478	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.401	6.881.496
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 47.719.150	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.563.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543.830	8.312.600
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 14.863.750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.777.650	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.750	2.955.530
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.338.490	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.328.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.698	865.760
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.276.350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.180.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	655.270	636.000
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 11.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.984.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000	2.196.920
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 101.176.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 99.956.400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235.200	19.991.280
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Rp 384.134.898	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 382.849.006	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.826.980	76.569.801
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 521.586.425	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 328.136.700	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104.317.285	65.627.340
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 521.586.425	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 328.136.700	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104.317.285	65.627.340
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp 245.560.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 230.084.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.112.000	46.016.960
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 245.560.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 230.084.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.112.000	46.016.960
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rp 116.979.890	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 111.059.725	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395.978	22.211.945
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp 116.979.890	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 111.059.725	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395.978	22.211.945



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2021	2020	2021	2022	2023	2021	2020	2021	2022	2023	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Rp 4.975.375.967	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.542.384.516	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	995.075.193	908.476.903
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Rp 4.294.768.127	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.977.951.556	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	858.953.625	795.590.311
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rp 636.692.840	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 535.408.960	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127.338.568	107.081.792
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Rp 43.915.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29.024.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783.000	5.804.800
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Rp 1.224.905.892	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.170.152.469	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.981.178	234.030.494
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Rp 1.224.905.892	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.170.152.469	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.981.178	234.030.494
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp -	Rp 5.501.593.586	Rp 5.666.571.426	Rp 5.694.285.108	Rp 6.319.918.282	Rp -	Rp 4.891.611.777	Rp 5.381.502.578	Rp 5.103.358.015	Rp 5.772.820.737	#DIV/0!	0,89	0,95	0,90	0,91	4.636.473.680	4.229.858.621
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	Rp 51.542.740	Rp 33.449.920	Rp 65.212.100	Rp 71.088.800	Rp -	Rp 51.263.700	Rp 33.318.000	Rp 65.024.100	Rp 70.939.740	#DIV/0!	0,99	1,00	1,00	1,00	44.258.712	44.109.108
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 4.654.398.738	Rp 4.848.990.068	Rp 4.854.227.450	Rp 5.046.203.040	Rp -	Rp 4.231.387.792	Rp 4.568.248.441	Rp 4.304.644.438	Rp 4.512.212.460	#DIV/0!	0,91	0,94	0,89	0,89	3.880.763.859	3.523.298.626
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp 191.400.000	Rp 78.520.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 191.117.025	Rp 67.950.000	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	0,87	#DIV/0!	53.984.000	51.813.405
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp -	Rp 173.750.830	Rp 126.925.870	Rp 197.168.990	Rp 277.968.650	Rp -	Rp 172.735.050	Rp 126.733.022	Rp 197.104.056	Rp 277.657.486	#DIV/0!	0,99	1,00	1,00	1,00	155.162.868	154.845.923
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.081.000	Rp 128.710.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29.905.000	Rp 128.180.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	1,00	31.758.200	31.617.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 90.761.278	Rp 87.615.568	Rp 90.885.568	Rp 62.487.792	Rp -	Rp 83.693.981	Rp 83.988.807	Rp 84.452.165	Rp 57.429.627	#DIV/0!	0,92	0,96	0,93	0,92	66.350.041	61.912.916
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp 531.140.000	Rp 378.190.000	Rp 378.190.000	Rp 733.460.000	Rp -	Rp 352.531.254	Rp 378.097.283	Rp 354.278.256	Rp 726.401.424	#DIV/0!	0,66	1,00	0,94	0,99	404.196.000	362.261.643
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp -	Rp 5.307.258.950	Rp 4.250.922.312	Rp 4.327.553.492	Rp 4.577.915.634	Rp -	Rp 4.769.123.718	Rp 4.191.628.484	Rp 4.235.163.881	Rp 4.476.536.528	#DIV/0!	0,90	0,99	0,98	0,98	3.692.730.078	3.534.490.522
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 4.460.196.310	Rp 3.460.763.602	Rp 3.454.735.792	Rp 3.852.192.184	Rp -	Rp 3.973.537.928	Rp 3.422.521.134	Rp 3.415.907.884	Rp 3.785.958.103	#DIV/0!	0,89	0,99	0,99	0,98	3.045.577.578	2.919.585.010
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp -	Rp 847.062.640	Rp 790.158.710	Rp 872.817.700	Rp 725.723.450	Rp -	Rp 795.585.790	Rp 769.107.350	Rp 819.256.030	Rp 690.578.425	#DIV/0!	0,94	0,97	0,94	0,95	647.152.500	614.905.519
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp -	Rp 1.328.155.340	Rp 1.659.597.250	Rp 1.512.858.130	Rp 1.479.968.632	Rp -	Rp 1.304.671.767	Rp 1.578.559.665	Rp 1.473.861.611	Rp 1.435.355.982	#DIV/0!	0,98	0,95	0,97	0,97	1.196.115.870	1.158.489.805
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 1.328.155.340	Rp 1.614.403.070	Rp 1.337.250.040	Rp 1.275.842.032	Rp -	Rp 1.301.671.767	Rp 1.534.030.342	Rp 1.304.529.201	Rp 1.241.904.997	#DIV/0!	0,98	0,95	0,98	0,97	1.111.130.096	1.076.427.261
Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.500.000	Rp 17.059.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.782.000	Rp 16.051.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	0,94	6.111.980	5.766.600
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Rp -	Rp -	Rp 45.194.180	Rp 137.108.140	Rp 137.107.800	Rp -	Rp -	Rp 44.529.323	Rp 132.771.550	Rp 128.270.085	#DIV/0!	#DIV/0!	0,99	0,97	0,94	63.882.024	61.114.192
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 24.999.950	Rp 49.958.900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23.778.860	Rp 49.129.900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	0,98	14.991.770	14.581.752



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota, terdapat 2 jenis pelayanan dasar meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Kinerja pelayanan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel II.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
INDIKATOR KINERJA UTAMA																			
1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum		√		-	25%	25%	25%	25%	-	31%	95,71%	72,77%	28,49%	-	124%	382%	291%	113%
2	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum			√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar			√	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%
STANDAR PELAYANAN MINIMAL																			
4	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebagai salah satu indikator capaian SPM sub urusan trantibumlinmas dengan capaian 100%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan urusan berkaitan dengan pelayanan dasar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat Kota Payakumbuh. Adapun tugas Satpol PP dan Damkar untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.

Bersama dengan jajaran Forkopimda, Satpol PP dan Damkar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Payakumbuh yang merupakan kelompok sasaran pelayanan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra layanan adalah pihak atau lembaga yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka menyediakan atau mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan mitra layanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, serta memperkuat hubungan antar instansi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh bersama TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh bersama TNI dan Polri dapat berkoordinasi dalam perencanaan keamanan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat melibatkan patroli bersama, pemeriksaan keamanan, dan penanganan situasi darurat.

Dalam hal Pemadaman Kebakaran, bekerja sama dengan PLN dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Hal ini tentu dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat kebakaran. PDAM Kota Payakumbuh juga menjadi mitra dalam pemberian pelayanan pemadaman kepada masyarakat Kota Payakumbuh. Seperti hydrant yang saat ini tersebar di beberapa lokasi Kota Payakumbuh.



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Pemadam Kebakaran tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Payakumbuh agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Payakumbuh memiliki luas 80.430 Km² dengan jumlah penduduk 146.731 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kota Payakumbuh cukup pesat, sehingga potensi akan adanya gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat cukup tinggi. Sehingga jumlah aparat Satpol PP saat ini belum memadai untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan msayarakat secara keseluruhan.

Selain melaksanakan patroli wilayah, tugas pengamanan juga dilaksanakan di aset Pemerintah Kota Payakumbuh, seperti rumah dinas dan beberapa kantor. Mengingat Kota Payakumbuh saat ini darurat sampah, pengamanan juga dilakukan di beberapa titik lokasi TPS liar yang ada di Kota Payakumbuh. Hal ini mengakibatkan patroli rutin dalam menjaga trantibumlinmas kurang maksimal karena kurangnya jumlah SDM di Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal meningkatkan keterampilan SDM, Satpol PP rutin melaksanakan kegiatan SMAPTA. Pelaksanaan kegiatan ini ideal dilakukan 1 kali dalam sebulan,



karena adanya keterbatasan anggaran, kegiatan ini dilakukan hanya 3 kali dalam satu tahun.

Mengingat luasnya Kota Payakumbuh dan perkembangan penduduk yang pesat, keaktifan Satlinmas di Kecamatan dan Kelurahan sangat diharapkan. Kondisi yang ada saat ini, Satlinmas hanya aktif pada saat Pemilihan Umum dilaksanakan. Aktifnya Satlinmas berdampak pada perlindungan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan patroli wilayah adalah roda 4 (empat). Seiring berkembangnya pembangunan objek wisata di Kota Payakumbuh, patroli dirasa perlu menggunakan kendaraan roda 2 (dua). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran Perda dan Perkada dengan cepat. Dalam pengamanan pun sarana dan prasarana juga dirasakan kurang.

Berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan disebutkan bahwasanya untuk satu unit kendaraan pemadam kebakaran minimal dioperasikan oleh 1 regu (6 orang) dan maksimal daerah yang bisa dilayani 3 kelurahan.

Kota Payakumbuh memiliki 47 Kelurahan, maka dibutuhkan lebih kurang 15 kendaraan pemadam kebakaran dengan 270 personil (untuk 3 shift kerja). Kebutuhan kendaraan dan personil dengan jumlah diatas dirasa sulit untuk dipenuhi karena adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang membutuhkan biaya besar. Dengan mempertimbangkan pelayanan optimal pada masyarakat, dirasa perlu pengadaan posko damkar di setiap Kecamatan dan satu unit kendaraan beserta personilnya.

Dalam operasi pemadaman kebakaran, tentu memiliki resiko yang sangat tinggi. Alat proteksi bagi petugas yang sesuai standar sangat dibutuhkan oleh petugas damkar. Asuransi jiwa pun dirasa perlu untuk proteksi petugas pemadam kebakaran saat di lapangan.

Mengingat tuntutan kerja masyarakat saat ini besar kepada pemadam kebakaran, diharapkan masyarakat juga dapat memahami untuk memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran saat melaksanakan operasi pemadaman dan penyelamatan. Hal ini dimaksudkan juga untuk keselamatan masyarakat Kota Payakumbuh pada umumnya. Tuntutan kerja ini hendaknya juga sebanding dengan peningkatan keterampilan petugas di lapangan, agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan optimal dan efektif.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Payakumbuh.
2. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
3. Sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang masih belum memadai.
4. Perkembangan teknologi yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
5. Perspektif negatif masyarakat terhadap Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada yang berlaku di Kota Payakumbuh.
6. Tuntutan masyarakat yang semakin besar atas peran Pemadam Kebakaran.
7. Kesadaran masyarakat pentingnya APAR di setiap bangunan dan kendaraan.
8. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan perumahan di Kota Payakumbuh.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat disimpulkan isu strategis untuk 5 tahun ke depan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu strategis yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP :
 - a. Masih adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Masih kurangnya pemberdayaan Satlinmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Masih kurangnya keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam menjaga ketentraman umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.



- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ketentraman ketertiban dan perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas).
- e. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menegakkan Perda dan Perkada Kota Payakumbuh.

2. Pemadam Kebakaran :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan APAR di setiap bangunan dan kendaraan.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan kendaraan Damkar saat operasi pemadaman kebakaran
- c. Masih lemahnya koordinasi antar instansi, terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha dengan Bidang Damkar
- d. Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- e. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pemadam kebakaran dan penyelamatan.



Tabel II.9
Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum tahun 2024 adalah 100%. 2. Persentase penyelesaian gangguan trantibum tahun 2024 adalah 100%. 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2024 adalah 100%. 4. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 adalah 100%.	1. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Masih terdapat pelanggaran Perda dan Perkada 3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran		Tujuan ke-16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Asta Cita ke 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur	Misi ke-6 Provinsi Sumbar : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	1. Satpol PP : a. Masih adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. b. Masih kurangnya pemberdayaan Satlinmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan. c. Masih kurangnya keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam menjaga ketentraman umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. d. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi trantibumlinmas. e. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menegakkan Perda dan Perkada Kota Payakumbuh. 2. Damkar : a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan APAR di setiap bangunan dan kendaraan. b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan kendaraan Damkar saat operasi pemadaman kebakaran c. Masih lemahnya koordinasi antar instansi, terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha dengan Bidang Damkar d. Pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. e. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pemadam kebakaran dan penyelamatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis tingkat tinggi yang nantinya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki keterkaitan dengan misi ketiga Wali Kota, yakni

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Dan Kondusif”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh menetapkan 3 sasaran yang menjadi kunci keberhasilan perangkat daerah 5 tahun ke depan. Adapun sasarannya yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan kata lain strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan.



Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	80,90	87	87	87	87	87	87
		2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	2. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	28,49%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		3. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	5,6 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit



Tabel III.2

Penahapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Meningkatkan Infrastruktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Meningkatkan Infrastruktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Meningkatkan Infrastruktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Meningkatkan Infrastruktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Meningkatkan Infrastruktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2. Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2. Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2. Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2. Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Meningkatkan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Instansi Vertikal Terkait dengan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3. Meningkatkan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Instansi Vertikal Terkait dengan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3. Meningkatkan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Instansi Vertikal Terkait dengan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3. Meningkatkan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Instansi Vertikal Terkait dengan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3. Meningkatkan Kerja Sama dengan Stakeholder dan Instansi Vertikal Terkait dengan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategi Perangkat Daerah. Untuk



mendukung kebijakan Pemerintah Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, mempertegas upaya dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, perlu adanya strategi dan arah kebijakan dari tujuan yang hendak dicapai.

Untuk melihat keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan sasaran, dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel III.3

Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1. Peningkatan Fasilitas Penegakan Perda untuk Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam melakukan Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran	
2		Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat	1. Penyediaan SDM yang Profesional dengan Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Dasar 2. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Anggota Regu dalam Rangka Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan	
3		Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders.	1. Mengembangkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya serta kelembagaan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 2. Meningkatkan sinergitas dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta dengan stakeholder terkait.	



Tabel III.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM Yang Kompetitif			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketentraman 1. dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan ketertiban umum 1. dan pelayanan perlindungan masyarakat	1.1 Peningkatan fasilitas dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
	1.2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.2 Peningkatan kemampuan personal pelayanan ketertiban dan penanganan situasi darurat
	1.3 Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		1.3 Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan penegak hukum, masyarakat dan stake holders



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Program dan Kegiatan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan rincian rincian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pendanaan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Guna mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Payakumbuh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 dan perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.

Alokasi anggaran di masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel IV.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran							
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas (Nilai)		
					Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (Nilai)		
					Nilai IKM (Indeks)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
					Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum (%)		
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Persentase masyarakat yg memahami perda pekat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Persentase PPNS yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)		
					Waktu tanggap (response time penanganan kebakaran (Menit)		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Persentase relawan yang bersertifikat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	



Tabel IV.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	90.43	91	13.701.264.452,00	91	22.273.205.042,00	91	18.233.818.676,00	91	17.527.630.495,00	91	17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.545.150,00		9.545.150,00		9.545.150,00		9.545.150,00		9.545.150,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	4	9.545.150,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.499.950,00		65.499.950,00		65.499.950,00		65.499.950,00		65.499.950,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	6	65.499.950,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00		1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawalan yang lengkap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	54	5.408.599.929,00	75	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	12	6.313.600,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.408.599.929,00		6.476.618.548,00		6.476.618.548,00		6.476.618.548,00		6.476.618.548,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	54	5.408.599.929,00	75	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	195	6.476.618.548,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				344.400.000,00		344.400.000,00		344.400.000,00		344.400.000,00		344.400.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	12	344.400.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.313.600,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	12	6.313.600,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	205	325.621.491,00	0	-	205	136.426.349,00	0	-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		325.621.491,00		-		136.426.349,00		-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	205	325.621.491,00	0	-	205	136.426.349,00	0	-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	3.058.200,00	12	3.366.000,00	12	3.702.600,00	12	4.072.860,00	12	4.480.146,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	80.082.000,00	12	80.090.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	29.579.500,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.647.650,00	1	1.815.000,00	1	1.996.500,00	1	2.196.150,00	1	2.415.765,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	5	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	2.081.150,00	1	2.289.650,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				1.647.650,00		1.815.000,00		1.996.500,00		2.196.150,00		2.415.765,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.647.650,00	1	1.815.000,00	1	1.996.500,00	1	2.196.150,00	1	2.415.765,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	5	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	-	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.579.500,00		32.497.850,00		32.497.850,00		32.497.850,00		32.497.850,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	29.579.500,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	5	32.497.850,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.081.150,00		2.289.650,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	2.081.150,00	1	2.289.650,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.058.200,00		3.366.000,00		3.702.600,00		4.072.860,00		4.480.146,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	3.058.200,00	12	3.366.000,00	12	3.702.600,00	12	4.072.860,00	12	4.480.146,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.082.000,00		80.090.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	80.082.000,00	12	80.090.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.408.750,00		1.408.750,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	1.408.750,00	1	1.408.750,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	-	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	1.000.000,00	1	127.307.051,00	1	1.000.000,00	1	105.132.198,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		34.570.000,00		34.570.000,00		34.570.000,00		34.570.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	-	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1	34.570.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	1.000.000,00		127.307.051,00		1.000.000,00		105.132.198,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	1.000.000,00	1	127.307.051,00	1	1.000.000,00	1	105.132.198,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase jasa penunjang urusan pemefintah daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.450.000,00	1	3.795.000,00	1	4.174.500,00	1	4.591.950,00	1	5.051.145,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	14.996.613,00	12	14.996.613,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	86.100.000,00	12	135.691.116,00	12	146.773.800,00	12	146.773.800,00	12	146.773.800,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.450.000,00		3.795.000,00		4.174.500,00		4.591.950,00		5.051.145,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	3.450.000,00	1	3.795.000,00	1	4.174.500,00	1	4.591.950,00	1	5.051.145,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.996.613,00		14.996.613,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	14.996.613,00	12	14.996.613,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.100.000,00		135.691.116,00		146.773.800,00		146.773.800,00		146.773.800,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	86.100.000,00	12	135.691.116,00	12	146.773.800,00	12	146.773.800,00	12	146.773.800,00	1.05.0.00.0.00.03.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	23	413.670.000,00	23	429.000.000,00	25	529.000.000,00	25	529.000.000,00	25	570.999.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.190.000,00	1	43.109.000,00	1	47.419.900,00	1	52.161.890,00	1	57.378.079,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.190.000,00		43.109.000,00		47.419.900,00		52.161.890,00		57.378.079,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.190.000,00	1	43.109.000,00	1	47.419.900,00	1	52.161.890,00	1	57.378.079,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				413.670.000,00		429.000.000,00		529.000.000,00		529.000.000,00		570.999.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	23	413.670.000,00	23	429.000.000,00	25	529.000.000,00	25	529.000.000,00	25	570.999.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.160.000,00		8.160.000,00		8.160.000,00		8.160.000,00		8.160.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	12	8.160.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		1.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100	13.701.264.452,00	100	22.273.205.042,00	100	18.233.818.676,00	100	17.527.630.495,00	100	17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0	80		80		80		80		1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	846	122	38.312.250,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	12	12	36.003.000,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dioegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	12	2.952.534.810,00	12	3.035.487.035,00	12	3.085.487.035,00	12	3.085.487.035,00	12	3.183.404.731,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36.003.000,00		72.106.500,00		72.106.500,00		72.106.500,00		72.106.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12	12	36.003.000,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	12	72.106.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				38.312.250,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	846	122	38.312.250,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	162	85.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				2.952.534.810,00		3.035.487.035,00		3.085.487.035,00		3.085.487.035,00		3.183.404.731,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	12	2.952.534.810,00	12	3.035.487.035,00	12	3.085.487.035,00	12	3.085.487.035,00	12	3.183.404.731,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase masyarakat yg memahami perda pekat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	2	21.246.750,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	0	0	-	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2	12	504.830.775,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				-		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	0	0	-	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				21.246.750,00		30.013.500,00		30.013.500,00		30.013.500,00		30.013.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	2	21.246.750,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	2	30.013.500,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				504.830.775,00		1.025.320.550,00		1.025.320.550,00		1.025.320.550,00		1.025.320.550,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2	12	504.830.775,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	12	1.025.320.550,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase PPNS yang Mengikuti Kegiatan Pelatihan	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				-		50.000.000,00		-		-		-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				-		-		-		-		-	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	0	60	13.701.264.452,00	70	22.273.205.042,00	80	18.233.818.676,00	90	17.527.630.495,00	90	17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	1	20.376.750,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran	0	0	-	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	14	500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20	20	2.131.429.100,00	20	7.081.876.845,00	20	3.134.437.658,00	20	2.250.653.766,00	20	2.160.030.075,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	168	12	1.307.110.225,00	12	1.325.109.544,00	12	1.457.620.498,00	12	1.603.382.548,00	12	1.763.720.803,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.376.750,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	1	20.376.750,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.307.110.225,00		1.325.109.544,00		1.457.620.498,00		1.603.382.548,00		1.763.720.803,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	168	12	1.307.110.225,00	12	1.325.109.544,00	12	1.457.620.498,00	12	1.603.382.548,00	12	1.763.720.803,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				-		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran	0	0	-	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	14	500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				2.131.429.100,00		7.081.876.845,00		3.134.437.658,00		2.250.653.766,00		2.160.030.075,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20	20	2.131.429.100,00	20	7.081.876.845,00	20	3.134.437.658,00	20	2.250.653.766,00	20	2.160.030.075,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian	1	1	16.059.650,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				16.059.650,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian	1	1	16.059.650,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase relawan yang bersertifikat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	94	94	110.677.850,00	94	500.000.000,00	94	159.850.136,00	94	175.835.149,00	94	193.418.664,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				110.677.850,00		500.000.000,00		159.850.136,00		175.835.149,00		193.418.664,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	94	94	110.677.850,00	94	500.000.000,00	94	159.850.136,00	94	175.835.149,00	94	193.418.664,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				13.701.264.452,00		22.273.205.042,00		18.233.818.676,00		17.527.630.495,00		17.728.853.404,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0	0	-	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	20	12	42.083.300,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				42.083.300,00		82.499.450,00		82.499.450,00		82.499.450,00		82.499.450,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	20	12	42.083.300,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	12	82.499.450,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				-		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
Tertaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0	0	-	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, ditetapkan 3 program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
1.	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatkan penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum, Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Komisioner dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penertiban 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemertan, Gelas Perik, dan Ruang Penyisiran Rong Rong) 1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS 1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
3.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelodung Diri	
			1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
			1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai indikator capaian. Untuk Melihat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategi, dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel IV.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran									
2.	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	87	87	87	87	87	87	87	
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
6.	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibun	%	5	5	5	5	5	5	5	



Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel IV.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2025-2029 Kota Payakumbuh	TARGET TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	KET
			Capaian Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IKK Outcome											
1	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	Menit	5	15	15	15	15	15	15	15	



Tabel IV.6
Indikator Kinerja Lainnya

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2025-2029 Kota Payakumbuh	TARGET TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	KET
			Capaian Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Indikator Kinerja Lainnya											
1	Persentase Penegakan Perda	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Angka Kriminalitas	Persentase	3,06	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80	3,80	3,80	
3	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V PENUTUP

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh.

Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan pemerintahan yang baik (Good Government).

Payakumbuh, 19 September 2025

**Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran**


DEWI NOVITA, S.STP, M.Si
NIP. 19791214 200003 2 001

I. METADATA INDIKATOR KINERJA

Lampiran 2:

METADATA INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tujuan

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Defenisi	Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas} = \frac{\sum \text{Skor Kinerja Program Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah Program Trantibumlinmas}} \times 100$ Keterangan: - Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik. - Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini (misalnya program keamanan, kegiatan bimbingan sosial, pengawasan ketertiban umum, dll.).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

METADATA INDIKATOR SASARAN / IKU

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat																		
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerjanya																		
Rumus Perhitungan	Nilai AKIP Total = $\sum_{i=1}^n (\text{Skor Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)$ Keterangan: - Komponen AKIP menurut Kemenpan-RB sebagai berikut : - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Tindak Lanjut Evaluasi - Penggunaan Hasil Evaluasi - Bobot disesuaikan kembali oleh Inspektorat Masing-Masing Daerah																		
Interpretasi		<table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan (AA)</td></tr><tr><td>>80-90</td><td>Memuaskan (A)</td></tr><tr><td>>70-80</td><td>Sangat Baik (BB)</td></tr><tr><td>>60-70</td><td>Baik (B)</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup (CC)</td></tr><tr><td>>30-50</td><td>Kurang '(C)</td></tr><tr><td>>0-30</td><td>Sangat Kurang (D)</td></tr></table>	Rentang Nilai	Predikat	>90 – 100	Sangat Memuaskan (AA)	>80-90	Memuaskan (A)	>70-80	Sangat Baik (BB)	>60-70	Baik (B)	>50-60	Cukup (CC)	>30-50	Kurang '(C)	>0-30	Sangat Kurang (D)	
Rentang Nilai	Predikat																		
>90 – 100	Sangat Memuaskan (AA)																		
>80-90	Memuaskan (A)																		
>70-80	Sangat Baik (BB)																		
>60-70	Baik (B)																		
>50-60	Cukup (CC)																		
>30-50	Kurang '(C)																		
>0-30	Sangat Kurang (D)																		
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																		
Frekuensi	Tahunan																		

2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Defenisi	Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$

	Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber Data	Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum
Defenisi	Mengukur efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan Perda oleh Satpol PP dalam menurunkan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibandingkan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pelanggaran Tahun } (n - 1) - \text{Pelanggaran Tahun } n}{\text{Pelanggaran Tahun } n - 1} \times 100\%$ Keterangan: - Pelanggaran tahun n-1 merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya - Pelanggaran tahun n merupakan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun ini (tahun perhitungan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pengawasan Perda dan Perkada yang dilakukan di Kota Payakumbuh
Sumber Data	Satpol PP dan Damkar
Frekuensi	Tahunan

3. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Nama Indikator	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Defenisi	Rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang disertai dengan layanan penyelamatan dan evakuasi korban terhadap total kejadian kebakaran dalam periode tertentu, yang menggambarkan efektivitas pelayanan penyelamatan oleh petugas.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran dengan Evakuasi dan Penyelamatan Korban}}{\text{Jumlah Total Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah evakuasi korban kebakaran termasuk dengan kejadian yang ditangani oleh relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas dan responsivitas layanan penyelamatan korban dalam kejadian kebakaran.

Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran
Definisi	Waktu yang dibutuhkan sejak laporan kejadian kebakaran diterima hingga unit pemadam pertama tiba di lokasi kejadian.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Waktu Response Time}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian}}$ Keterangan: Waktu Response Time merupakan waktu kedatangan di lokasi dikurangi waktu laporan diterima.
Interpretasi	Semakin cepat waktu tanggap (semakin kecil nilai menit), semakin baik respons dan kesiapsiagaan pelayanan penanganan kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

META DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI

Nama Indikator	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Defenisi	Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui sosial media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber Data	Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Defenisi	Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Defenisi	Rasio antara jumlah kejadian kebakaran yang disertai dengan layanan penyelamatan dan evakuasi korban terhadap total kejadian kebakaran dalam periode tertentu, yang menggambarkan efektivitas pelayanan penyelamatan oleh petugas.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran dengan Evakuasi dan Penyelamatan Korban}}{\text{Jumlah Total Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$

	Keterangan: Jumlah evakuasi korban kebakaran termasuk dengan kejadian yang ditangani oleh relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas dan responsivitas layanan penyelamatan korban dalam kejadian kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran
Deflnisi	Waktu yang dibutuhkan sejak laporan kejadian kebakaran diterima hingga unit pemadam pertama tiba di lokasi kejadian.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Keseluruhan Waktu Response Time}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kejadian}}$ Keterangan: Waktu Response Time merupakan waktu kedatangan di lokasi dikurangi waktu laporan diterima.
Interpretasi	Semakin cepat waktu tanggap (semakin kecil nilai menit), semakin baik respons dan kesiapsiagaan pelayanan penanganan kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

META DATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) disini merupakan indikator yang tidak menjadi IKU OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Defenisi	Persentase jumlah Perda dan Perkada yang telah ditegakkan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total jumlah Perda dan Perkada yang menjadi target penegakan pada tahun berjalan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif penegakan Perda dan Perkada di daerah tersebut.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam suatu wilayah dalam satu tahun, dinyatakan sebagai jumlah kejahatan per 1000 penduduk. Ini memberikan gambaran tentang tingkat kejahatan relatif dalam populasi yang diberikan untuk menilai tingkat keamanan daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kriminalitas (per 1000 penduduk)} = \frac{\text{Jumlah Kejahatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin tidak aman suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin aman suatu daerah. Tujuannya adalah memantau dan menganalisis tren kriminalitas untuk keperluan kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Defenisi	Persentase jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Satpol PP dalam kurun waktu tertentu.

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Pengaduan yang Masuk}} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk bisa melalui social media, telepon, dan pengaduan langsung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian pengaduan, semakin bagus kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sumber Data	Laporan Bulanan Bidang Tibum Tranmas dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Frekuensi	Tahunan

META DATA INDIKATOR PROGRAM

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Total Perda dan Perkada yang Ada}} \right) \times 100$ Keterangan: • Perda: Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut. • Perkada: Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci. • Penegakan: Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Tibumtranmas) .
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas} = \left(\frac{\text{Jumlah Program Tibumtranmas yang Dilaksanakan dengan Baik}}{\text{Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan}} \right) \times 100$ Keterangan: • Program Tibumtranmas mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah, pengawasan ketertiban umum, penanganan kerusakan sosial, serta program perlindungan masyarakat. • Dilaksanakan dengan Baik berarti program yang sudah mencapai target yang ditetapkan, seperti pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, dan efisiensi dalam penanganan masalah ketertiban. • Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan adalah jumlah seluruh program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase cakupan perlindungan Masyarakat
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Rumus Perhitungan	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat = $\left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlindungi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Masyarakat yang Terlindungi: Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan). • Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan: Adalah estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara.
Rumus Perhitungan	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya = $\left(\frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan: Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka. • Jumlah Total PPNS yang Ada: Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik program peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Nama Indikator	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi}}{\text{Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi: Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran. • Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran: Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas wilayah yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan atau sesuai program edukasi

Nama Indikator	Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Korban Kebakaran}} \right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi: Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran. • Jumlah Total Korban Kebakaran: Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan atau per kejadian kebakaran.

META DATA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti
Defenisi	Ukuran banyaknya pelanggaran terhadap perda yang telah dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang Ditemukan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif dan responsifnya penegakan terhadap pelanggaran perda
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Nama Indikator	Persentase Masyarakat yang Memahami Perda Pekat
Defenisi	Ukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi, larangan, dan sanksi dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Responden yang Memahami Perda Pekat}}{\text{Jumlah Responden yang Disurvei}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa sosialisasi Perda Pekat semakin efektif dan menjangkau masyarakat luas.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

3. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Kasus Kebakaran WMK yang Tertangani dalam Waktu Tanggap
Defenisi	Ukuran proporsi penanganan kasus kebakaran di wilayah tertentu (WMK) yang berhasil ditangani oleh petugas dalam waktu tanggap standar (response time) yang telah ditetapkan. Keterangan :

	WMK adalah Wilayah Manajemen Kebakaran yang mengatur mengenai batas wilayah layanan instansi yang melayani pemadaman kebakaran.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran yang Ditangani dalam Waktu Tanggap}}{\text{Total Kasus Kebakaran WMK}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan kesiapsiagaan dan kecepatan layanan pemadaman yang baik di wilayah WMK
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

4. Investigasi Kejadian Kebakaran

Nama Indikator	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang Dilaksanakan
Defenisi	Ukuran proporsi kasus kebakaran yang dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab, lokasi awal api, kerugian, dan pihak terkait dalam kejadian tersebut..
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang Diinvestigasi}}{\text{Total Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kejadian kebakaran tidak hanya ditangani secara reaktif tetapi juga dianalisis penyebabnya sebagai dasar pencegahan ke depan.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Nama Indikator	Persentase Relawan yang Bersertifikat
Defenisi	Ukuran proporsi relawan yang telah mengikuti pelatihan resmi dan memperoleh sertifikat kompetensi di bidang penanggulangan kebakaran, bencana, atau kedaruratan lainnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Relawan yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Total Relawan yang Terdaftar}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan kesiapan, kualitas, dan profesionalisme relawan dalam mendukung penanggulangan darurat dan trantibum
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

6. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan
Defenisi	Ukuran capaian jumlah permintaan atau laporan kondisi membahayakan manusia (selain kebakaran) yang berhasil ditindaklanjuti dengan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan oleh petugas
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Laporan Kondisi yang Membahayakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan kecepatan dan kesiapan petugas dalam merespons permintaan penyelamatan atas kondisi membahayakan manusia.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Tahunan

II. MANAJEMEN RESIKO

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RESIKO			SEBAB		C / UC	DAMPAK	
		URAIAN	KODE RESIKO	PEMILIK	URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK TERKENA
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat									
Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Menurunnya akuntabilitas kinerja OPD	1.1	Kepala OPD	Tidak optimalnya proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kinerja OPD	Internal	C	Menurunnya kepercayaan publik	PD, Masyarakat
Sasaran 1.2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Tidak terselesaikannya gangguan trantibum yang terjadi	1.2	Kepala OPD	Kurang pahamnya masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang berlaku	Eksternal	UC	Muncul konflik sosial	Masyarakat
	Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	Meningkatnya pelanggaran trantibum	1.2	Kepala OPD	Lemahnya penegakan Perda dan Perkada	Eksternal	C	Terganggunya rasa aman dan nyaman masyarakat	Masyarakat
Sasaran 1.3 Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Menurunnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.3	Kepala OPD	Kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang rendah	Internal	C	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak maksimal	PD, Masyarakat
	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Waktu tanggap penanganan tidak sesuai standar	1.3	Kepala OPD	Kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang rendah	Internal	C	Tingginya kerugian yang dialami korban kebakaran	Masyarakat

III. POHON KINERJA

Lampiran 3 :
POHON KINERJA

